

## **Internalisasi Pemikiran Sukarno Melalui Kaderisasi Politik Partai Nasionalis : Kasus Terhadap PDI Perjuangan**

**Fahmy Iss Wahyudy**

Doktoral Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

[Fahmy18001@mail.unpad.ac.id](mailto:Fahmy18001@mail.unpad.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This article discusses and analyzes the internalization process of Sukarno's ideas within the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P). Sukarno was a significant political figure in the trajectory of Modern Indonesia, and he developed a number of ideas that have inspired political behavior in the contemporary era, such as Pancasila, Marhaenism, and Tri-sakti. This research is interesting amidst the main phenomenon of political parties in Indonesia that moving away from ideological conflicts and fracture. The research is using a qualitative method. By using a case study approach that features an in-depth view of social events, this research is expected to explain in detail the process of internalization of ideas carried out by PDI-P towards its members and cadres. The results of the study indicate that PDI-P internalized Sukarno's ideas through several methods, particularly cadre development and political education. To support this success, the party includes Sukarno's teachings as mandatory cadre development material outlined in the Articles of Association (AD) and Bylaws (ART). These materials are then continuously delivered at all levels of cadre development and political education, from primary, intermediate, to primary.*

**Keywords : Internalization, Sukarno, Cadreization, PDI Perjuangan**

### **LATAR BELAKANG**

Sukarno merupakan salah satu tokoh penting guna membaca serta mempelajari trayektori perkembangan politik Indonesia modern, ia bersama rekan se-generasinya yang brilian seperti Moh Hatta, Sutan Syahrir, Agus Salim, dan lainnya adalah peletak dasar bagi berdirinya sebuah bangunan besar bernama Republik Indonesia. Kebesaran Sukarno dapat dilihat dari berbagai gelar yang disematkan padanya, terutama pada periode puncak karir politiknya, mulai dari Pemimpin Besar Revolusi, Penyambung Lidah Rakyat, Walijul Amri, Panglima Besar, sampai Ratu Adil. Dengan latar belakang (*background*) tersebut, tidak

mengherankan jika kemudian banyak cendekiawan maupun intelektual yang begitu tertarik untuk menyusun publikasi maupun tulisan-tulisan lainnya tentang Sukarno.

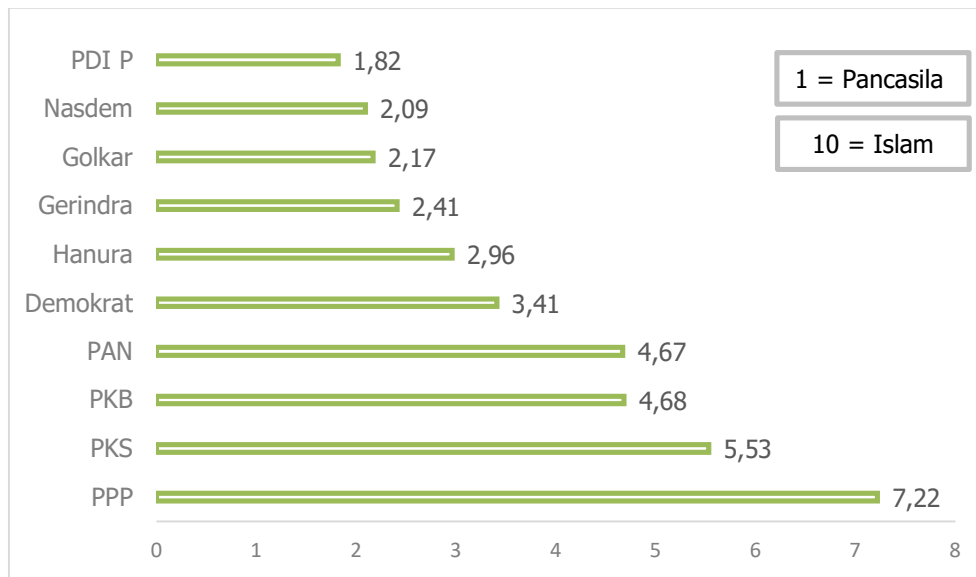
Meskipun demikian, sebagaimana kritik yang disampaikan oleh Kusman (2023), belakangan ini terdapat kecenderungan untuk tidak meletakkan kekuatan Sukarno pada gagasan intelektualnya, melainkan lebih kepada karisma dan daya pikatnya sebagai seorang pribadi yang mampu menghipnotis rakyat. Berbagai hal tentang Sukarno menjadi magnet yang menarik minat banyak orang dan kelompok, mulai dari gaya berpakaian, cara bertutur kata, kemampuan berpidato, termasuk mitos-mitos yang menyelimuti kemisteriusan Sukarno. Sementara itu, kristalisasi dari pemikiran-pemikirannya semasa menjadi aktivis maupun politisi berskala internasional justru semakin ditinggalkan.

Memudarnya pemikiran Sukarno dari wacana dan praktik politik juga ikut diperparah oleh kebijakan De-Sukarnoisasi Orde-Baru, yang menghilangkan berbagai hal terkait Sukarno dari memori kolektif masyarakat selama lebih dari 32 tahun (Sudibyo, 1998). Baru setelah Orde Baru jatuh yang diikuti bergulirnya reformasi politik 1998, sejumlah lembaga masyarakat dan organisasi politik kembali memantapkan diri untuk mempelajari dan menanamkan buah pemikiran Sukarno, salah satunya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Partai yang berdiri pada 10 Januari 1999 tersebut merupakan metamorfosa dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang eksis di era otoritarianisme Orde Baru, sementara secara ideologis, partai ini merupakan partai nasionalis yang bersandar pada pemikiran-pemikiran Sukarno (Mietzner & East, 2012).

Dalam arus *mainstream* studi Ilmu Politik di Indonesia, nampaknya terdapat kesepakatan bahwa pasca peristiwa '65 yang diikuti dengan praktik de-ideologisasi dan de-politisasi yang dijalankan Orde Baru, keberwarnaan ideologi politik yang dalam konseptualisasi Feith dan Castles (1970) disebut 'politik aliran' sudah tidak lagi relevan. Pada era reformasi, dalam iklim politik yang kian pragmatis, Partai Politik menjadi semakin tidak ideologis, adapun parpol-parpol hanya dapat diidentifikasi melalui dua spektrum utama, yakni kubu nasionalis-sekuler dan Islam (Fossati, 2019).

Identifikasi Nasionalis-Islam tersebut lebih banyak didasarkan pada posisi dan kebijakan parpol berkaitan dengan relasi antara Negara dan Agama. Selain itu, posisi tersebut juga dihasilkan melalui data-data empiris yang diperoleh melalui survei persepsi publik. Berikut merupakan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang bekerja sama dengan *Australian National University* (ANU) pada Tahun 2017 :

Tabel 1 : Skala Partai Berbasis Pancasila dan Islam



Sumber : Lembaga Survei Indonesia, 2017

Dengan menggunakan 508 responden secara acak yang berlatar belakang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada 31 Provinsi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa PDI Perjuangan dipersepsikan sebagai partai yang paling Pancasila dengan poin 1,82, sementara di sisi berlawanan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan poin 7,22 dipersepsikan oleh responden sebagai partai yang ideologinya paling Islam. Data tersebut mengkonfirmasi sejumlah hasil penelitian lain tentang ideologi politik PDI Perjuangan. Salah satunya Latif (2011), yang menyatakan bahwa PDI Perjuangan adalah partai nasionalis-pancasilais yang hidup di era kontemporer, yang menimba air susu ideologis dari leluhurnya seperti Partai Nasional Indonesia (PNI).

Pada banyak komunikasi publik yang disampaikan, PDI Perjuangan acapkali menunjukkan pentingnya gagasan Sukarno dalam membimbing praktek kepartaiannya (jpnn.com, 2020). Upaya PDI Perjuangan untuk mendekatkan diri terhadap Sukarno juga termanifestasikan dalam sejumlah hal, termasuk penggunaan simbol-simbol dan atribut bergambarkan Sukarno dalam setiap perhelatan seremonial partai. Selain itu, PDI Perjuangan juga acapkali menggunakan terminologi-terminologi yang dipopulerkan oleh Sukarno, diantaranya seperti Marhaen dan Trisakti.

Semasa hidupnya, Sukarno memang terkenal bukan hanya sebagai aktivis cum politisi yang piawai, melainkan juga seorang pembaca dan penulis yang produktif. Tercatat Sukarno memiliki sejumlah *masterpiece*, atau buah karya pemikiran yang monumental seperti Pancasila, dan Marhaenisme. Menurut Onghokham (2013), intelektualitas Sukarno tersebut merupakan buah dari interaksinya dengan sejumlah penulis kenamaan melalui perantara buku-buku bacaan. Sejak usia belia, Sukarno sudah sangat familiar dengan pemikir-pemikir

seperti Otto Bauer, Karl Kautsky, Karl Marx, Henrietta Roland Rost, Ernest Renan dan lainnya (Legge, 2013).

Berkaitan dengan argumentasi-argumentasi tersebut, maka penelitian ini akan mengetengahkan topik tentang bagaimana PDI Perjuangan sebagai institusi politik menginternalisasikan pemikiran-pemikiran utama Sukarno melalui kaderisasi Partai. Kaderisasi sendiri secara konseptual merupakan proses pembentukan kader yang dilakukan secara terarah, sistematis, terukur, berjenjang dan berkelanjutan yang dilakukan melalui sejumlah metode tertentu (Muslih, 2023). Dengan berfokus pada kegiatan kaderisasi, maka gambaran proses internalisasi diharapkan akan lebih komperhensif dan menghindari kesan yang sporadis.

Penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan kebaruan di tengah masih minimnya penelitian yang berfokus pada internalisasi pemikiran politik dalam institusi kepartaian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran utuh tentang kaderisasi PDI Perjuangan, dari aspek aturan (*legal-formal*), implementasi, hingga hasil (*output*) yang dihasilkan oleh proses berjenjang tersebut.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Tentang Internalisasi**

Secara konseptual, internalisasi selalu berkaitan dengan proses sosial yang terjadi pada individu maupun kelompok dengan karakteristik bergerak dari luar menuju ke dalam. Umumnya, proses tersebut melibatkan perangkat-perangkat nilai seperti ideologi, pengetahuan, moralitas, etika, dan kesadaran politik (*political conciusness*). Dalam tradisi ilmu sosial, sejumlah sarjana telah banyak melakukan pendefinisian terhadap konsep tersebut.

Salah satu diantaranya adalah Nurjanah (2017), yang melihat bahwa internalisasi merupakan proses pemasukan nilai pada individu dengan tujuan membentuk pola pikir dalam melihat makna dan realitas sosial politik yang berlangsung. Sebangun dengan konseptualisasi tersebut, Kartono (2009) juga berpendapat bahwa internalisasi merupakan pengaturan ide, norma, karakter, nilai, yang berasal dari luar ke dalam pikiran seseorang. Kedua pandangan tersebut memiliki kesamaan terkait proses penanaman nilai yang bersifat abstrak menuju alam berfikir seorang manusia.

Sementara itu, mundur sedikit ke belakang, Robert dalam Mulyana (2004) melihat internalisasi sebagai model sistematisasi pemikiran. Menurutnya, internalisasi merupakan proses penyatuan nilai dalam diri individu melalui penanaman keyakinan, nilai, sikap, praktik dan aturan-aturan baku. Sebagai sebuah proses penanaman, internalisasi sendiri selalu diharapkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dengan menggunakan Pancasila sebagai titik tolaknya, Kaelan (2013) menyebut bahwa setiap proses internalisasi diharapkan mampu

menciptakan sejumlah pengetahuan berikut : 1) Pengetahuan; 2) Kesadaran; 3) Ketaatan; 4) Kemampuan; 5) Watak dan Hati Nurani.

Dalam konteks Partai Politik, internalisasi acapkali berkaitan dengan penanaman nilai-nilai yang dianut oleh Partai terhadap anggota maupun kadernya. Nilai-nilai yang dimaksud dapat berbentuk Ideologi, asas, maupun pemikiran-pemikiran politik yang dianggap menginspirasi Partai Politik bersangkutan. Proses internalisasi tersebut menjadi sangat penting agar Partai mampu mencapai ke-idealan seperti yang disampaikan oleh Sulaeman (2015), di mana parpol dan kader-kadernya mampu secara kompak menjalankan program-program yang disusun berdasarkan ideologi yang kuat.

### **Kaderisasi Partai Politik**

Kaderisasi merupakan elemen kunci bagi keberlangsungan hidup sebuah Partai Politik. Tanpa Kaderisasi yang optimal, Partai Politik akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, keorganisasian, anggota, dan ketahanan partai mereka sendiri. Dalam konteks kelembagaan, kaderisasi menjadi bagian dari dimensi rutinisasi (*routinization*), yang kemudian menjadi parameter bagi terlembaga atau tidaknya sebuah Partai Politik (Romli, 2016).

Dalam praktek kepartaian, kaderisasi merupakan proses penyiapan sumber daya anggota dan kader agar kualitasnya dapat meningkat dalam menjalankan peran dan fungsi institusi Partai Politik (Kartono, 2009). Pada dasarnya, belum ada konsensus bersama untuk menggunakan terminologi yang sama dalam studi tentang kaderisasi partai politik. Oleh karenanya, masih banyak ditemukan sejumlah studi tentang kaderisasi parpol yang menggunakan istilah berbeda-beda, seperti diantaranya *cadreization*, *political training*, *forming of cadres* dan seterusnya. Meskipun menggunakan terminologi yang berbeda-beda, pada prinsipnya sejumlah terminologi tersebut memiliki kesamaan makna, yakni kaderisasi.

Kaderisasi partai politik selalu berkaitan dengan proses yang terukur dan sistematis dalam kerangka mendidik, memandu dan mempersiapkan anggota-anggotanya agar memiliki kompetensi yang diharapkan oleh Partai. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Harris et al (2016), kaderisasi memiliki empat agenda utama, diantaranya : 1) memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai ideologi yang diperjuangkan partai, lengkap dengan visi-misi dan haluan perjuangan partai (platform politik); 2) menumbuhkan militansi melalui penanaman ideologi (*visioning*); 3) upaya meningkatkan kapasitas kader dalam kaitan tata kelola Partai Politik, Birokrasi dan Pemerintahan.

Secara konseptual, kaderisasi merupakan intervensi partai politik untuk meningkatkan kapasitas individu anggotanya agar kompeten dalam menjalankan berbagai tugas kepartaian (Fahri, 2011). Untuk mendapatkan target yang dicanangkan, Partai Politik idealnya memiliki parameter yang ketat sebagai tolak ukur dari keberhasilan kaderisasi yang dijalankan. Berkaitan dengan hal tersebut, Noor (2016) mengusulkan empat parameter utama, diantaranya : 1) pemahaman tentang Ideologi dan asas Partai; 2) pemahaman kader sebagai

anggota partai maupun anggota masyarakat; 3) pemahaman tentang manajemen dan aturan-aturan partai; 4) nilai-nilai kepartaian yang perlu dijalankan oleh seluruh anggota.

Melalui sejumlah penalaran tersebut, kaderisasi memiliki makna penting dalam mentransmisikan dan menginternalisasikan nilai serta prinsip-prinsip fundamental Partai terhadap kader-kadernya. Selanjutnya, secara teoritik, upaya dan langkah-langkah Partai dalam menata sistem kaderisasinya perlu dituangkan dalam dokumen-dokumen resmi Partai, termasuk diantaranya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan Partai, dan Manifesto politiknya. Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaan kaderisasi memiliki basis yang solid dan kuat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (2016) studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang melakukan penelitian ilmiah melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi yang majemuk, serta melaporkan deskripsi dan tema kasus. Adapun dalam teknik pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara mendalam terarah dengan subjek atau informan penelitian yang ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa informan terlibat langsung proses kaderisasi PDI Perjuangan. Selain itu, peneliti juga melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai sumber penelitian seperti dokumen-dokumen resmi partai, buku, jurnal, artikel, surat kabar dan informasi lain melalui situs internet yang dinilai memiliki korelasi dengan topik utama penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kerangka Formal Sistem Kaderisasi PDI Perjuangan**

Kaderisasi masih menjadi persoalan serius yang banyak disorot dalam sejumlah literatur berkaitan dengan praktek kepartaian di Indonesia. Haris (2020) bahkan menyimpulkan bahwa mayoritas Partai Politik tidak memiliki sistem kaderisasi yang baku, terukur, berkala, berjenjang dan bersifat inklusif. Masih lemahnya aspek tersebut ditengarai berkonsekuensi terhadap bermunculannya sejumlah masalah lain bagi institusi kepartaian di Indonesia (Akbar & Firdaus, 2013).

Wajah dari lemahnya sistem kaderisasi yang dimiliki oleh Partai Politik terefleksikan oleh hadirnya sejumlah fenomena seperti maraknya politisi 'kutu loncat' dan pengkandidasian selebritis nir-pengalaman untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Di antara mayoritas Partai Politik yang bergulat dengan permasalahan tersebut, PDI Perjuangan menjadi salah satu pengecualian, partai ini dianggap relatif masih memiliki ideologi yang jelas dan kaderisasi yang solid (Kompas, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tom Maskun, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, partainya memang menaruh atensi besar terhadap kaderisasi. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari keseriusan PDI Perjuangan dalam mempersiapkan berbagai landasan aturan sebagai pijakan bagi pelaksanaan kaderisasi. Dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 88 tentang kaderisasi, PDI Perjuangan menyusun kaderisasinya secara berjenjang, yakni Kaderisasi Tingkat Pratama untuk tingkatan wilayah Kabupaten dan Kota, Kaderisasi Tingkat Madya untuk tingkatan Provinsi, dan Kaderisasi Tingkat Utama untuk tingkatan wilayah Pusat. Setiap jenjang kaderisasi memiliki durasi pelaksanaan yang berbeda, seperti dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2 : Durasi Kaderisasi

	<b>Pratama</b>	<b>Madya</b>	<b>Utama</b>
<b>Kelas</b>	4 Hari	6 Hari	7 Hari
<b>Pendidikan Lapangan</b>	1 Hari	2 hari	3 Hari
<b>Penugasan</b>	6 Bulan	3 Bulan	1 Bulan

Sumber : Materi Penguatan Ideologi Melalui Kaderisasi DPP PDI Perjuangan, 2019

Menurut Tom Maskun, dalam setiap periode kepengurusan yang berlangsung selama lima (5) tahun, struktur pengurus di tingkatan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki kewajiban untuk setidaknya melaksanakan satu (1) kali kaderisasi. Sementara itu, berkaitan dengan pentingnya pemikiran Sukarno dalam berbagai jenjang kaderisasi tertuang dalam Pasal 10 AD tentang tugas partai. Dalam huruf c, partai bertugas untuk menjabarkan, menyebarluaskan, dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Desain besar dalam penginternalisasian ajaran Sukarno melalui kaderisasi kemudian dituangkan dalam ART Pasal 86 tentang Materi Kaderisasi. Dalam hal ini, materi dibagi ke dalam dua klaster yakni pokok atau utama dan pendukung. Dalam huruf satu (1) pasal tersebut mengemukakan bahwa materi utama terdiri dari : a) Indonesia Menggugat Tahun 1930; b) Mencapai Indonesia Merdeka Tahun 1933; c) Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945; d) Membangun Dunia Kembali 1960; e) Nawaksara Tahun 1966; dan f) Pidato Ketua Umum Pada Kongres Partai.

Sementara itu, dalam huruf dua (2) materi yang bersifat pendukung diantaranya adalah : a) Kapitalisme Bangsa sendiri Tahun 1932; b) Amanat Presiden Sukarno Tahun 1959; c) Amanat Presiden Sukarno Tahun 1960; d) Deklarasi Ekonomi Tahun 1963; dan e) Marhaenisme adalah Teori Perjuangan Tahun 1965. Berdasarkan aturan-aturan baku tersebut, nampak jelas bahwa PDI Perjuangan memiliki komitmen untuk menginternalisasikan buah dari pemikiran-pemikiran Sukarno melalui pelaksanaan kaderisasi partainya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Danuwidjaya dan Manan (2023) bahwa PDI Perjuangan menekankan agar kader-kadernya diharuskan menguasai ideologi partai yang berpusat pada pemikiran Sukarno.

Guna memastikan proses kaderisasi berjalan sebagaimana mestinya, PDI Perjuangan menugaskan Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi untuk mengkoordinasikan segala bentuk kaderisasi, baik formal maupun non-formal yang diselenggarakan oleh Partai. Mengutip dari AD ART PDI Perjuangan periode 2020-204, Bidang Ideologi dan Kaderisasi bertugas memiliki tugas untuk menjaga garis ideologi partai dan mengembangkan pemahaman anggota tentang Ideologi partai melalui sistem kaderisasi secara berjenjang dan terpadu, serta melaksanakan koordinasi pendidikan kader, melakukan monitoring, evaluasi, penguatan, dan regenerasi kader. Bidang Ideologi dan Kaderisasi sendiri menjadi mandat organisasi untuk dibentuk pada setiap jenjang kepengurusan, mulai dari DPP, DPD, dan DPC Partai.

Sementara itu, dalam konteks pelaksanaan kaderisasi, bidang Ideologi dan Kaderisasi dibantu oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat). Berdasarkan pasal 34 ART PDI Perjuangan, Badiklat bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota dan kader Partai, serta membuat sistem kualifikasi kader. Dengan demikian, Badiklat memiliki tugas pada dimensi yang lebih operasional. Hal ini secara signifikan berbeda dengan Bidang Ideologi dan Kaderisasi yang berfungsi pada tingkatan koordinatif dan strategis.

### **Implementasi dan Implikasi dari Internalisasi Pemikiran Sukarno**

Sejak pelaksanaan Kongres III Tahun 2010, PDI Perjuangan telah berketetapan untuk menjadi Partai Pelopor yang berdisiplin secara teori, organisasi, gerakan dan tindakannya (jpnn.com, 2023). Secara konseptual, Partai Pelopor sendiri mengacu pada gagasan Sukarno yang ditulis dalam sebuah risalah berjudul 'Mencapai Indonesia Merdeka' pada Tahun 1933 (Sukarno, 2015). Dengan demikian, untuk mewujudkan gagasan Partai Pelopor tersebut, PDI Perjuangan menetapkan pijakan ideologisnya melalui pemikiran-pemikiran Sukarno. Meskipun demikian, PDI Perjuangan sendiri memang telah sejak awal mengikuti ajaran-ajaran Sukarno (Kaligis, 2014).

Realisasi dari cita-cita tersebut kemudian dijalankan melalui internalisasi pemikiran-pemikiran Sukarno. Internalisasi pemikiran Sukarno sendiri dapat dimaknai sebagai proses penanaman ide politik pada anggota dan kader sebagai upaya membentuk kepribadian, cara berfikir, bertindak, berperilaku dalam berbagai aktivitas kepartaian. Pada pelaksanaannya, upaya yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menginternalisasikan pemikiran Sukarno terhadap anggota dan kader partai tersebut dilakukan dengan sejumlah cara, diantaranya : 1) Kaderisasi Partai; 2) Pendidikan Politik Kader; 3) Seminar-seminar serta FGD (*Forum Group Discussion*) Partai dan IV) Kegiatan Partai lainnya.

Dalam konteks kaderisasi dan pendidikan politik PDI Perjuangan, nyaris seluruh pelaksanaannya selalu menjadikan pemikiran-pemikiran Sukarno sebagai materi utama. Internalisasi pemikiran Sukarno menggunakan metode kaderisasi dapat diartikan sebagai usaha PDI Perjuangan untuk membentuk pola pikir, perilaku dan kedisiplinan kader agar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam gagasan-gagasan Sukarno. Mencuplik dokumen Materi Penguatan Ideologi Melalui Kaderisasi yang disusun oleh Badiklat DPP PDI



Perjuangan, suasana penanaman gagasan Sukarno nampak kentara dari struktur Materi yang wajib disampaikan selama kegiatan berlangsung, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 3 : Struktur Materi Penguatan Ideologi Melalui Kaderisasi

<b>Ideologi</b>	<b>Bahan Diskusi Kelompok</b>
Pancasila 1 Juni	Pidato Bung Karno 1 Juni 1945
Trisakti dan Revolusi Mental	Indonesia Menggugat
AD/ART-Pemenangan Partai	Mencapai Indonesia Merdeka
Cara Berfikir Bung Karno	Sarinah
<b>Materi Diskusi</b>	<b>Materi Diskusi Pendukung</b>
Membangun Dunia Kembali 1960	Kapitalisme Bangsa Sendiri Tahun 1932
Pidato Nawaksara Tahun 1966	Amanat Presiden Sukarno Tahun 1959
AD/ART Pemenangan Partai	Amanat Presiden Sukarno Tahun 1960
Pidato Ketua Umum dalam Kongres III PDI Perjuangan di Bali Tahun 2010	Deklarasi Ekonomi Tahun 1963 dan Marhaenisme adalah Teori Perjuangan Tahun 1965

Sumber : Badiklat Pusat PDI Perjuangan, 2019

Tabel tersebut menunjukan komitmen PDI Perjuangan untuk menginternalisasikan gagasan-gagasan Sukarno, bahkan lebih jauh tidak ada literatur atau pun buah pemikiran dari tokoh politik lain yang dijadikan sebagai referensi selama pelaksanaan kaderisasi. Selain materi-materi dalam kaderisasi, materi pembelajaran dalam pendidikan kader juga secara konsisten menghadirkan buah pemikiran Sukarno. Hal tersebut dapat dilihat dari dokumen laporan-laporan kegiatan pendidikan kader Partai seperti berikut :

Tabel 4 : Daftar makalah narasumber dalam Pendidikan Kader PDI Perjuangan

<b>Judul Makalah</b>	<b>Penulis</b>
Indonesia Menggugat : Ajaran dan Teori Perjuangan Bung Karno	Sidarto Danusubroto
Pidato Indonesia Menggugat, Pidato Pancasila 1 Juni, Pidato Presiden Sukarno Nawaksara	Cornelis Lay
Ideologi Pancasila dalam Praktek Tata Pemerintahan	Komarudin Watubun
Pengorganisasian Cabang Pelopor dalam Perspektif Pendidikan Kader	Achmad Basarah
Gotong Royong : Realitas Sosial, Pemikiran Sukarno – Ideologi dan <i>Tools of Party Life</i>	Andreas Hugo Pareira

Sumber : Laporan Kegiatan Pendidikan Kader Pendidik DPP PDI Perjuangan, 2012

Selain menggunakan metode formal seperti kaderisasi dan pendidikan politik yang tertuang dalam AD/ART Partai, PDI Perjuangan juga melakukan internalisasi gagasan Sukarno melalui sejumlah kegiatan informal lainnya, seperti seminar dan kegiatan seremonial partai. Sukarno yang berwawasan luas dengan pemahaman mendalam dari spektrum kiri

yang sosialisitik sampai kanan yang bernuansa keagamaan memberikan keuntungan (*advantage*) bagi PDI Perjuangan untuk menyesuaikannya sesuai dengan kultur politik di berbagai wilayah.

Pada sejumlah wilayah yang kental atas ikatan politik dan agama seperti di Aceh (Kumalasari, 2021), PDI Perjuangan melakukan internalisasi melalui pendekatan yang bernafaskan Islam. Salah satunya adalah dengan melakukan seminar dengan tema "Aceh, Bung Karno, Islam dan Pancasila (gesuri.id, 2020). Model-model informal tersebut menjadi salah satu cara yang dilakukan PDI Perjuangan dalam menanamkan pemikiran Sukarno ke elemen akar rumput.

Berdasarkan sejumlah temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PDI Perjuangan secara sistematis berupaya menginternalisasikan pemikiran-pemikiran Sukarno, baik dari Ideologi, gagasan, keyakinan politik, sistem bernegara dan lainnya. Implikasi utama yang diharapkan dari proses tersebut tentu saja berkaitan dengan tertanamnya sukarnoisme di benak anggota dan kader. Hal ini berkaitan dengan tujuan agar kader serta seluruh komponen partai lainnya memahami, mengerti, dan merealisasikan pemikiran Sukarno dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam merumuskan kebijakan internal dan eksternal Partai.

Secara konseptual, internalisasi pemikiran politik tentu membutuhkan waktu dan metode yang terukur, sehingga dapat mencapai kesesuaian dengan agenda yang dicitakan oleh Partai. Persoalannya, agenda internalisasi tersebut juga bukan tanpa masalah. Menurut keterangan Tom Maskun, proses internalisasi melalui metode kaderisasi seringkali dihadapkan pada persoalan mendasar, diantaranya kecakapan kader serta waktu dan biaya pelaksanaan. Pada satu sisi, proses internalisasi tidak selamanya dapat berjalan mulus secara linier, hal ini diakibatkan oleh masih lemahnya penerimaan kader terhadap muatan ideologis pemikiran Sukarno yang secara kategoris 'berat' dan 'rumit'.

Pada kenyataannya, tidak semua kader dan anggota, terutama di tingkatan bawah memiliki latar belakang pendidikan yang sama, termasuk kemampuan dalam mencerna materi secara *equivalen*. Pada saat dilangsungkan ujian atau tes akhir kaderisasi, masih terdapat sejumlah kader yang belum dapat secara optimal mencerna gagasan-gagasan Sukarno tersebut. Selanjutnya, durasi pelaksanaan kaderisasi yang memakan waktu sehari-hari juga dianggap berkonsekuensi terhadap besarnya pendanaan yang harus disediakan. Dengan aturan bahwa pelaksanaan kaderisasi pratama yang minimal dilangsungkan selama empat (4) hari, kaderisasi madya enam (6) hari, dan utama tujuh (7) hari, pengurus partai sesuai tingkatannya acapkali kesulitan dalam menanggung operasional pelaksanaan yang cenderung lama tersebut. Akibatnya, masih terdapat DPC maupun DPD yang tidak mampu memenuhi kewajiban untuk melaksanakan kaderisasi minimal satu kali selama periodisasinya berjalan.

## KESIMPULAN

Sebagai partai yang mencitrakan diri sebagai keturunan ideologis Sukarno, PDI Perjuangan secara konsisten berupaya menginternalisasikan pemikiran-pemikiran tokoh tersebut dalam berbagai metode, terutama kaderisasi dan pendidikan politik bagi kader dan anggotanya. Secara prinsip, hal tersebut sejalan dengan idealitas yang dikemukakan oleh Noor (2016), bahwa Partai Politik harus menerapkan proses internalisasi nilai yang terstandarisasi untuk memastikan bahwa setiap anggota memahami Ideologi partai secara setara dan dapat mengembangkan hal tersebut sebagai kode etik partai.

Secara umum, PDI Perjuangan melihat bahwa internalisasi pemikiran Sukarno merupakan hal penting dalam kedudukannya untuk membimbing kesadaran kader dalam berperilaku dan bertindak. Pada penerapannya, strategi yang digunakan meliputi sejumlah cara, seperti diantaranya penguatan sistem kaderisasi, pengaplikasian melalui materi-materi pokok kaderisasi, pendidikan politik, seminar, dan pelatihan-pelatihan yang dikoordinasikan oleh partai.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, pelaksanaan internalisasi pemikiran Sukarno oleh PDI Perjuangan juga bukan tanpa kendala. Secara umum, faktor-faktor seperti masih rendahnya kemampuan kader dalam mencerna materi, waktu dan biaya pelaksanaan kaderisasi yang besar menjadi penghambat bagi proses internalisasi pemikiran Sukarno. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan proses internalisasi, PDI Perjuangan masih membutuhkan sejumlah perbaikan, baik yang bersifat kelembagaan, desain, termasuk sejumlah aspek teknis lainnya.

## REFERENSI

- Adian, G., Pramowardhani, J., & Latif, Y. (2011). *Kembalinya Politik Ideologi: Manifesto Politik PDI-Perjuangan*. Depok: Pustaka Empat Lima.
- Akbar, A., & Firdaus, S. (2013). Menemukan modal pengakaran partai melalui pembenahan wajah partai di level organisasi dan level pemerintahan. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1, 279–293. <https://doi.org/doi/10.37058/jipp.v1i3.2277>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Ed 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danuwidjaja, A. F., & Manan, F. (2023). Hubungan Antara Kaderisasi dan Ideologi dalam Partai Politik: Studi Kasus Aktivitas Internal PDIP. *Epistemik: International Journal of Social and Political Science*, 4(1).
- Fahri, M. (2011). Manajemen Pengelolaan Sumberdaya Manusia Partai Politik (Studi Tentang Konflik Internal DPD PAN Kabupaten Ogan Kumering Ulu Sumsel). *Dinamika*, 4(7), 58–71.
- Feith, H., & Castles, L. (1970). *Indonesian Political Thinking 1945 – 1965 Herbert Feith Lance Castles*. London: Cornell University Press.

- Fossati, D. (2019). *The Resurgence of Ideology in Indonesia : Political Islam , Aliran and Political Behaviour*. <https://doi.org/10.1177/1868103419868400>
- Haris et al. (2016). *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai POLitik Ideal di Indonesia* (I. N. Bhakti & M. Nurhasim, eds.). Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Haris, S. (2020). *Menuju Reformasi Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaligis, R. (2014). *Marhaen dan Wong Cilik : Membedah Wacana dan Praktik Nasionalisme bagi Rakyat Kecil dari PNI sampai PDI-Perjuangan*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Kartono, K. (2009). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kumalasari, R. (2021). Relasi agama dan politik di aceh pasca konflik : Pemerintah Indoensia-Gerakan Aceh Merdeka. *Adabiya*, 23(1), 1–18.
- Kusman, A. P. (2023). *Merahnya Ajaran Bung Karno : Narasi Pembebasan ala Inonesia*. Tangerang: Penerbit GDN.
- Legge, J. D. (2013). *Sukarno : Sebuah Biografi Politik* (I). Tangerang Selatan: baca.
- Mietzner, M., & East, S. (2012). *Ideology , money and dynastic leadership : the Indonesian Democratic Party of Struggle , 1998 – 2012*. 24(2009), 511–531. <https://doi.org/10.5367/sear.2012.0123>
- Mulyana. (2004). *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Noor, F. (2016). Leadership and Ideological Bond : PPP and Internal Fragmentation in Indonesia. *Studia Islamika*, 23(1), 61–103. <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i1.2808>
- Nurjanah, S. (2017). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Pelajar (Upaya Mencegah Aliran Anti Pancasila di Kalangan Pelajar ). *El-Wasathiya : Jurnal Studi Agama*, 5(1).
- Onghokham. (2013). *Sukarno, Orang Kiri, Revolusi & G30S 1965*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Romli, L. (2016). Reformasi partai politik dan sistem kepartaian di indonesia. *Politica*, 2, 199–220. <https://doi.org/doi.org/10.22212/jp.v2i2.292>
- Sudibyo, A. (1998). De-Soekarnoisasi Dalam Wacana Resmi Orde Baru : Kilas Balik Praktek-Praktek Rekayasa Kebenaran dan Wacana Sejarah Oleh Rejim Orde Baru. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.11156>
- Sukarno. (2015). *Di Bawah Bendera Revolusi I* (I). Yogyakarta: Media Pressindo dan Yayasan Bung Karno.
- Sulaeman, A. (2015). Demokrasi, partai politik, dan pemilihan kepala daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 12–24.

<https://www.jpnn.com/news/megawati-minta-calon-kada-pdip-baca-buku-bung-karno>

<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/08/20252361/yusril-partai-ideologis-hanya-pdi-p-dan-pbb-sisanya-pragmatis>

<https://www.gesuri.id/internal/bung-karno-pdi-perjuangan-aceh-gelar-webinar-pada-17-juni-b1YNCZtWX>